ARTIKEL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMDA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013-2015



Oleh: NUR HIDAYATUR ROHMAH 13.1.02.01.0050

Dibimbing oleh:

- 1. Drs. Ec. Sugeng, Ak., M.M., M.Ak., CA
 - 2. DiahNurdiwaty, S.E., M.SA.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2017





Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri

SURATPERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN2017

Yang bertanda tangandibawahini:

Nama Lengkap

: NUR HIDAYATUR ROHMAH

NPM

: 13.1.02.01.0050

Telepun/HP

: 085736111994

Alamat Surel (Email)

: nhrohmah5@gmail.com

Judul Artikel

:Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemda Kabupaten Dan Kota Di

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015

Fakultas - Program Studi

: EKONOMI-AKUNTANSI

NamaPerguruan Tinggi

: UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Alamat PerguruanTinggi

: Jl. KH. AchmadDahlan No 76 Mojoroto Kediri

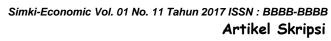
Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetah	Kediri, 15 Agustus 2017			
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,		
Drs. Ec. Sugeng, Ak., M.M., M.Ak., CA NIDN. 713026101	DiahNurdiwaty, S.E., M.S.A. NIDN. 072806720	Nur HidayaturRohmah NPM. 13.1.02.01.0050		

Nur HidayaturRohmah | 13.1.02.01.0050 Ekonomi – Akuntensi simki.unpkediri.ac.id





Universitas Nusantara PGRI Kediri



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMDA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013-2015

Nur HidayaturRohmah
13.1.02.01.0050
Ekonomi - Akuntansi
Nhrohmah5@gmail.com
Drs. Ec. Sugeng, Ak., M.M.,M.Ak.,CA dan DiahNurdiwaty, S.E., M.SA.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. 2) Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. 3) Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. 4) Mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. 5) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah totaling sampling yaitu seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yaitu 114 dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS for windows versi 23

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan Penelitian yang dilakukan secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

KATA KUNCI:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH)

I. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik. Otonomi daerah yang terjadi bukan hanya



penyerahan tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga disertai dengan pelimpahan wewenang untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan pemerintah kesempatan daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang untuk membiayai belanja digunakan modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah (Undangundang no 23 Tahun 2014). Provinsi Jawa Timur adalah salah satu Provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditingkatkan perlu dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah

dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan.

Dengan adanya otonomi daerah memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah agar bisa lebih mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal. Adapun sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). (Undang-undang no.23 Tahun 2014)

Dalam menyelenggarakan fungsipemerintah fungsi daerah, penyelenggaraan akan terlaksana secara optimal apabila pemerintah memberikan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus seimbang, dimana besarnya akan disesuaikan dan disamakan sesuai dengan pembagian kewenenganan dan prosedur dalam sistem kerjanya. Menurut Undang-undang no 23 tahun 2014 Hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah



suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab.

Pemberian otonomi kepada daerah selama yaitu dalam hal merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah adalah sesuai kondisi daerah. Sejak era reformasi, khususnya reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pendanan dari sumber pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan penerimaan dari PAD perlu perhatian mendapat yang seriusdari pemerintah daerah agar daerah tidak mengandalkan terlalu atau menggantungkan pada harapan pemerintah pusat,tetapi harus mampu mandiri sesuai dengan cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (Mahmudi,2010). Kenyataan yang terjadi sekarang Provinsi Jawa Timur masih belum stabil Rasio Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan pada LRA sebelumnya Tahun Pemerintah Prov/Kab/Kota di Jawa Timur.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah mengalokasikan dana

bersumber yang dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras penyelengaraan dengan urusan pemerintahan (Undang-undang 23/2014). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya.

Berdasarkan penelitian telah yang dilakukan (Nora Devi Y :2015) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur secara rata-rata selama tahun 2010-2012 mengalami peningkatan, peningkatan yang signifikan terjadi pada Surabaya. Kabupaten Ngawi dan Sedangkan Rasio Pendapatan asli Daerah terhadap pendapatan Daerah rata-rata masih mempunyai kontribusi yang rendah yaitu dibawah 20%. Peningkatan PAD ternyata tidak selalu meningkatkan Belanja Modal Daerah.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan



APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.23 Tahun 2014). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, insfrastruktur jalan dan jembatan, insfrastruktur irigasi, isnfrastruktur air minum dan sanitasi, prasaran pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasaran pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.23 Tahun 2014). Dengan adanya Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah daerah bisa memanfaatkan untuk mengurus daerahnya.

Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat

kepercayaan publik. Pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki posisi yang sangat strategis, terutama dalam aspek perekonomiannya. Dalam Aspek perekonomian, sektor pertanian dan industri pengolahan sebagai pendorong utama perekonomian daerah.Dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan potensi sumber daya fiskal yang tersedia baik di tingkat Kabupaten/Kota, Jawa Timur memiliki Peluang besar untuk menstabilkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Aalokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil



(DBH) yang diharapkan dapat memberikan nformasi besar dalam meningkatkan pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Maka Dalam Penelitian ini mengambil Judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Anggaran Modal **PEMDA** Belanja Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2015".

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu menjelaskan pengaruh antar variabel dengan menganalisis data numerik (angka) menggunakan data statistik melalui pengujian hipotesa. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil variabel dependen, yaitu Belanja Modal. Adapun Data Penelitian ini bisa diambil di web http://www.bps.go.id.

Menurut Sugiyono (2012:120), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel ditetapkan dengan Teknik *purposive Sampling*, yakni

Nur HidayaturRohmah | 13.1.02.01.0050

Ekonomi- Akuntansi

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu.

Adapun kriteria dalam pengambilan sampel ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

 a. Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang telah mempublikasikan Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2013-2015

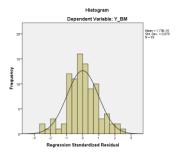
dan Kota Kabupaten yang menyediakan data yang dibutuhkan dari variabel penelitian secara lengkap yaitu Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil . Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah sampel yang memenuhi kriteria dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 6 Kota. Jadi Kabupaten dan Kota yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 Kabupaten dan 6 Kota sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 31 x 3 tahun = 93 Kabupaten dan Kota.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

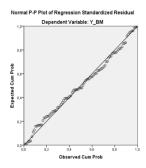
1. Hasil Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas





Sumber: Output SPSS 23



Sumber: Output SPSS 23

Berdasarkan gambar 4.1 dan 4.2 dapat dilihat bahwa data telah berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan gambar tersebut sudah memenuhi dasar pengambilan keputusan.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearit	y Statistics
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	4441462,912	19113981,56 4		,232	,817		
X1_PAD	,454	,049	,489	9,193	,000	,686	1,458
X2_DAU	,092	,030	,193	3,061	,003	,488	2,051
X3_DAK	1,226	,189	,358	6,473	,000	,633	1,579
X4_DBH	,255	,045	,259	5,672	,000	,930	1,075

a. Dependent Variable: Y_BM

Nur HidayaturRohmah | 13.1.02.01.0050

Ekonomi – Akuntansi

Uji multikolinieritas berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahi bahwa variabel X1 memiliki tolerance 0,686 dan VIF sebesar 1,458. Pada variabel X2 dapat diketahui nilai tolerance 0,488 dan VIF sebesar 2,051. Pada X3 dapat diketahui nilai tolerance 0,633 dan VIF sebesar 1,579 Pada X4 dapat diketahui nilai tolerance 0,930 dan VIF sebesar 1,075. Dengan demikian dalam model ini tidak ada multikolinieritas karena telah memenuhi dasar pengambilan keputusan.

c. Analisis Uji Autokorelasi

Dalam tabel pengambilan keputusan autokorelasi menunjukkan bahwa Durbin-Watson hasil hitung sebesar 1,744, sedangkan dalam tabel DW untuk jumlah sampel 93 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4). Oleh karena itu DW 1,744 lebih besar dari batas atas (du) 1,752 dan kurang dari 4-1,752(4-du), maka dapat disimpulkan bahwa berada didaerah maka ragu-ragu, digunakan uji nonparametrik yaitu RunTest.

Runs Test

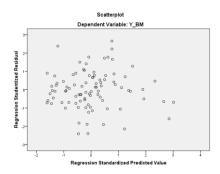


	Unstandardized Residual		
Test Value ^a	-2710528,38266		
Cases < Test Value	46		
Cases >= Test Value	47		
Total Cases	93		
Number of Runs	42		
Z	-1,146		
Asymp. Sig. (2-tailed)	,252		

a. Median

Dari tabel Run Test tersebut diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi berada diatas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

d. Uji Heteroskedativitas



Uji heterokedastisitas berdasarkan gambar 4.3 yang ditunjukkan oleh grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak menunjukkan pola tertentu, tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

 $Y = \alpha \ + \beta 2PAD + \beta 3DAU + \beta DAK + \beta DBH + e$ Nur HidayaturRohmah | 13.1.02.01.0050 Ekonomi – Akuntansi

$$BM = 2,192 + 0,454PAD + 0,092DAU + 1,226DAK + 0,225DBH$$

C. Pengujian Hipotesis

1. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan, model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi mengukur untuk kemampuan model dalam variabel-variabel menerangkan dependen. Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusu dan dana bagi hasil terhadap belanja modal dapat diketahui nilai koefisien determinasi simultan (R2).

	Model Summary ^⁵					
				Std. Error		
			Adjusted R	of the		
Model	R	R Square	Square	Estimate		
1	,911ª	,829	,821	55280643,3		
	,511	,023	,021	71		

a. Predictors: (Constant), X4_DBH, X3_DAK, X1_PAD, X2_DAU

Berdasarkan hasil analisis tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted* R- *Square*) sebesar 0,821. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi terhadap pengalokasian belanja modal sebesar 82,1% dan

simki.unpkediri.ac.id

b. Dependent Variable: Y_BM



sisanya yaitu 17,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

2. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	4441462,912	19113981,56 4		,232	,817		
X1_PAD	,454	,049	,489	9,193	,000	,686	1,458
X2_DAU	,092	,030	,193	3,061	,003	,488	2,051
X3_DAK	1,226	,189	,358	6,473	,000	,633	1,579
X4_DBH	,255	,045	,259	5,672	,000	,930	1,075

a. Dependent Variable: Y_BM

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menggunakan uji t yang nilainya akan dibandingkan dengan signifikansi 0,05 atau 5% pada tabel 4.7.

Adapun hasil dari uji T (Uji parsial) adalah sebagai berikut :

a. H₁ : 0,000 ≤ taraf signifikan 0,05
 maka H₀ ditolak, berarti Pendapatan
 Asli Daerah (X₁) secara parsial
 berpengaruh signifikan terhadap
 Pengalokasian Belanja Modal.

- b. H2 : 0,003 ≤ taraf signifikan 0,05
 maka H0 ditolak, berarti Dana
 Alokasi Umum (X2) secara parsial
 berpengaruh signifikan terhadap
 Pengalokasian Belanja Modal.
 - c. H₃ : 0,000 ≤ taraf signifikan 0,05 maka H₀ ditolak, berarti Dana Alokasi Khusus (X₃) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
 - d. H4 : 0,000 ≤ taraf
 signifikan 0,05 maka H₀ ditolak,
 berarti Dana Bagi Hasil (X4) secara
 parsial berpengaruh signifikan
 terhadap Pengalokasian Belanja
 Modal.

3. Uji Simultan (Uji f)

			ANOVA ^a				
Мо	del	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regressio	13058712251451		32646780628	106,83	,000	
	n	28450,000	4	6282110,000	0	b	
	Residual	26892355877032	88	30559495314			
		1888,000	00	80930,500			
	Total	15747947839154	92				
		50370,000	02				

a. Dependent Variable: Y_BM

b. Predictors: (Constant), X4_DBH, X3_DAK, X1_PAD, X2_DAU



atistik F atau Analysis Of Variance (ANOVA) pada dasarnya menunjukkan apakah semjua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independennya.

H₁ : 0,000 ≤ taraf signifikan 0,05
maka H₀ ditolak, berarti
Pendapatan Asli Daerah (X₁),
Dana Alokasi Umum (X₂), Dana
Alokasi Khusus (X₃), dan Dana
Bagi Hasil (X₄), secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap
Pengalokasian Belanja Modal.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015. Berdasarkan penelitian hasil dan

pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

Hasil uji asumsi klasik, berdasarkan analisis grafik dan statistik bahwa data telah terdistribusi normal. Model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Model ini tidak ada masalah juga multikolinieritas dan tidak terdapat masalah autokorelasi. Persamaan regresi ini juga tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik dalam model regresi linier berganda.

Dari hasil pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
 Dalam hal ini dapat kita simpulkan jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Anggaran belanja modal meningkat.



- Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
- Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
- Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
- 5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji f dengan hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 berada dibawah 0,05 yang berarti secara simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tersebut (variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal

IV. DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Hakim. 2010. Statistik Deskriptif. Yogyakarta :Ekonisia

Arsyad, Licolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5. Yogyakarta. STIM YKPN Yogyakarta.

Arwati, Dini dan Novita Hadiati. 2013. Pertumbuhan Pengaruh Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah. SEMATIK 2013. ISBN 979-26-0266-6 Defi Yanti, Nora. 2015. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.

Halim. Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.

http://www.bpsgo.id

Kuncoro Mudrajad. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang. Jakarta : Erlangga.

Mahmudi, (2010) Manjemen Keuangan Daerah, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Noordiawan, Deddi. dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat



Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK/.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang *Dana Perimbangan*

Purwantoo Fiona Puspita Devi. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomiu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (studi kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011). Prodi Akuntansi, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Yogyakarta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Komninasi. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Komninasi. Bandung: CV. Alfabeta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2005. Hukum Pemerintah Daerah. Pustaka Bani Quraisy

Nur HidayaturRohmah | 13.1.02.01.0050 Ekonomi – Akuntansi Wandira Arbi Gugus. 2012. :Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal".